

PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN LAUT PELABUHAN PERIKANAN CIREBON DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

Andi Perdana Gumilang^{1*}, Evi Susilawati²

¹Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Jl. Perjuangan No. 17 Cirebon, 45135, Indonesia

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Jl. Perjuangan No. 17 By Pass Cirebon, Indonesia

*Email: andiperdana@untagcirebon.ac.id

ABSTRAK

Wilayah Cirebon yang memiliki pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan ekonomi perikanan. Namun peran dan potensi tersebut masih belum dioptimalkan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan subsektor perikanan pada pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas hasil tangkapan unggulan di pelabuhan perikanan kejawanan yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Cirebon. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komoditas perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang menjadi unggulan utama adalah Cumi-cumi, Pari, Layang, Tetengkek, Tongkol, Abu-abu, Kuwe, Japuh, Alu-Alu, Biji Nangka, Golok-golok, dan Talang. Hal ini karena memiliki nilai pertumbuhan LQ positif dengan skor 3. Skor LQ 3 mengindikasikan bahwa jenis-jenis ikan tersebut terkonsentrasi pendaratannya secara relatif di pelabuhan perikanan kejawanan dan dapat terus dikembangkan dengan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peranan subsektor perikanan Cirebon merupakan sektor basis dengan nilai LQ 3,02.

Kata Kunci: analisis LQ, ekonomi wilayah, pelabuhan perikanan

ABSTRACT

Cirebon region which has a fishing port as a landing place for catches has a strategic role in fisheries economic development. However, the role and potential are still not optimized properly. The purpose of this study was to analyze the role of the fisheries subsector in the economic development of commodity-based catches at the port of Kejawanan fishery which is the largest fishing port in Cirebon. The analytical tool used in this study is the Location Quotient (LQ) analysis. The results showed that the capture fisheries commodities in the fishing port that were the main seeds were squid, stingray, gliding, tetengkek, cob, gray, Kuwe, Japuh, Alu-Alu, Jackfruit seeds, Cleaver-machete, and Talang. This is because it has a positive LQ growth value with a score of 3. The LQ score of 3 indicates that these fish species are relatively concentrated landing at the port of fishing and can continue to be developed with sustainable fisheries management to encourage regional economic growth. The role of the Cirebon fisheries sub-sector is a base sector with a LQ value of 3.02.

Keywords: LQ analysis, regional economy, fishing port

PENDAHULUAN

Wilayah Cirebon yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar. Potensi sumberdaya perikanan di wilayah Cirebon menunjukkan kondisi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan ekonomi. Di sisi lain potensi perikanan yang besar dapat dijadikan penopang ketahanan pangan yang efektif (Srinivasan 2010). Selama lima tahun terakhir periode 2013-2017 subsektor perikanan termasuk salah satu lapangan usaha yang berkontribusi terbesar bagi struktur perekonomian Cirebon. Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB kota dan kabupaten Cirebon atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan subsektor perikanan tahun 2017 sebesar 3,2 dan 3,11% (BPS Cirebon, 2018). Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis sektor perikanan, khususnya subsektor perikanan tangkap. Hal ini karena secara geografis dan demografis wilayah Cirebon sangat sesuai dalam pengembangan potensi usaha perikanan, dilihat dari mata pencaharian penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan usaha pembudidayaan ikan tawar, payau dan laut serta keberadaan lokasi beberapa pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan tangkap yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan fungsi pelabuhan dari pusat pelayanan menjadi pusat distribusi pemasaran akan membuat hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan menjadi optimal.

Pelabuhan perikanan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan laut dan masyarakat nelayan. Hal ini karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang di dalamnya terdapat hubungan antar kelompok seperti nelayan, pedagang, pengolah maupun unsur masyarakat terkait lainnya. Salah satu pelabuhan perikanan

terbesar yang berada di pantai utara wilayah Cirebon adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan sebagai representatif dari pelabuhan perikanan di wilayah utara Jawa Barat. Sebagai salah satu lokasi industrialisasi perikanan, PPN Kejawanan memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat maupun perekonomian wilayah Cirebon karena merupakan pelabuhan perikanan yang memiliki akses darat (*hinterland*) ke kota besar serta memiliki potensi kelautan yang sangat besar di daerah penangkapan (*fore-land*) pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, 718 dan 573.

Menurut laporan statistik PPN Kejawanan, produksi ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan pada tahun 2018 berjumlah 4.276 ton dengan nilai produksi 173 Milyar. Potensi sumberdaya perikanan laut tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat menggerakkan pembangunan ekonomi wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pemanfaatan sektor perikanan laut perlu menitikberatkan pada penentuan komoditas-komoditas unggulan di pelabuhan perikanan sehingga dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan perikanan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan (Irnawati et al., 2011). Penelitian sebelumnya dalam peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan telah dilakukan (Hendriani et al. 2013), tetapi baru mengkaji mengenai ekonomi politik kebijakan pemerintah Cirebon dan belum mencakup pembangunan ekonomi wilayah yang difokuskan pada hasil tangkapan berbasis komoditas unggulan pada pelabuhan perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan subsektor perikanan pada pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas hasil tangkapan unggulan di pelabuhan

perikanan terbesar di Cirebon agar pengelolannya dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama bulan April 2019 di PPN Kejawanan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Penelitian merupakan penelitian studi kasus yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui besarnya peranan sektor perikanan dalam menunjang pembangunan ekonomi wilayah Cirebon dan mengidentifikasi potensi unggulan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan terbesar di wilayah Cirebon yakni PPN Kejawanan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara terhadap beberapa stakeholder yang berhubungan dengan komoditas unggulan di PPN Kejawanan yaitu produksi hasil tangkapan, unit penangkapan, wilayah penangkapan dan distribusi. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait penelitian seperti PPN Kejawanan, Badan Pusat Statistik, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

Analisis Data

Analisis Peranan

Peranan subsektor perikanan tangkap di wilayah Cirebon dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembangunan perekonomian meliputi kontribusinya dalam penyerapan pendapatan daerah (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Analisis yang digunakan meliputi analisis Location Quotient (LQ). Metode location quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor perikanan pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor perikanan pada tingkat kabupaten/kota terhadap pendapatan kabupaten/kota

(Budiharsono, 2001). Hal tersebut secara perhitungan dapat ditulis sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

dimana :

v_i : pendapatan subsektor perikanan di wilayah Cirebon

v_t : total pendapatan seluruh sektor di wilayah Cirebon

V_i : pendapatan subsektor perikanan di Provinsi Jawa Barat

V_t : total pendapatan seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat

LQ_i: nilai LQ sektor di wilayah Cirebon

Sektor basis wilayah Cirebon dapat dianalisis dengan menggunakan analisis location quotient (LQ) yang dilihat dalam konteks wilayah Cirebon sebagai bagian dari perekonomian Provinsi Jawa Barat. Menurut (Rizal, 2013) nilai koefisien LQ < 1 menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif. Bila koefisien LQ = 1 maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Sedangkan koefisien LQ > 1 memiliki arti bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif yang lebih dari rata-rata atau dengan kata lain merupakan sektor basis.

Analisis Komoditas Hasil Tangkapan Unggulan

Penentuan ikan hasil tangkapan unggulan di PPN Kejawanan dilakukan dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). LQ merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa ikan di PPN Kejawanan Cirebon dalam aktivitas perikanan tangkap dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas di Provinsi Jawa Barat. Adapun metode LQ yang digunakan dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$LQ = \frac{\frac{\sum X_{ij}}{X_j}}{\frac{\sum X_{ij}}{X}} \quad (1)$$

Keterangan:

X_{ij} : Volume produksi ikan jenis ke-j di PPN Kejawanan

X_i : Volume produksi ikan jenis ke-j di Provinsi Jawa Barat

X_j : Volume total produksi semua jenis yang diuji di PPN Kejawanan

$X..$: Volume total Produksi semua jenis yang diuji di Provinsi Jawa Barat

j : 1,2,, n (banyak jenis ikan yang di uji).

Interpretasi nilai LQ:

$LQ > 1$, menunjukkan terjadinya konsentrasi produksi/ pasar perikanan di PPN Kejawanan secara relatif dibandingkan dengan produksi/pasar perikanan Provinsi Jawa Barat, atau dapat terjadi pemusatan aktivitas terkait produksi dan pemasaran ikan di PPN Kejawanan, atau terjadi produksi yang lebih tinggi di PPN Kejawanan dibandingkan di PP/PPI lainnya di Provinsi Jawa Barat

$LQ = 1$, maka pada PPN Kejawanan mempunyai produksi/pasar perikanan, atau aktivitas perikanan setara dengan produksi total Provinsi Jawa Barat atau setara dengan semua PP-PP lainnya di Provinsi Jawa Barat.

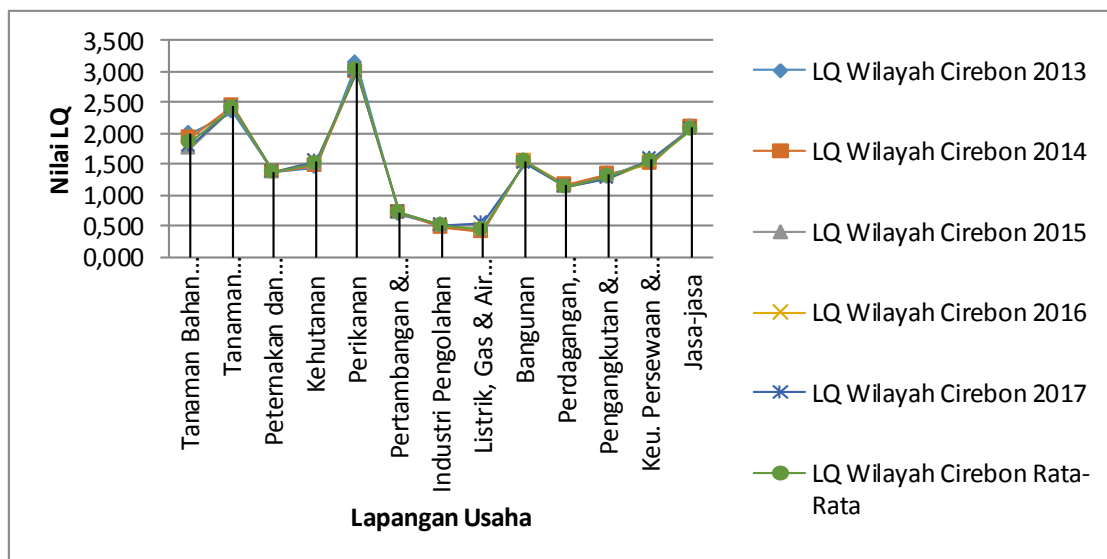
$LQ < 1$, maka PPN Kejawanan mempunyai produksi/pasar perikanan atau aktivitas perikanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Barat atau produksi ikan di Pelabuhan

Kejawanan lebih kecil dibandingkan di PP/PPI lainnya di Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan sektor perikanan terhadap pembangunan Cirebon

Analisis LQ dilakukan dengan menghitung nilai LQ sektor perikanan terhadap pendapatan sektor perikanan, keseluruhan sektor dan tenaga kerja di wilayah Cirebon. Nilai hasil perhitungan LQ di wilayah Cirebon khususnya sektor perikanan dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa sektor perekonomian yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah sektor perikanan yakni rata-rata sebesar 3,02. Peranan sektor perikanan di wilayah Cirebon merupakan sektor basis dalam pengembangan perekonomian wilayah.



Gambar 1. Hasil Perhitungan Nilai LQ Wilayah Cirebon terhadap Provinsi Jawa Barat (2013-2017)
Sumber: BPS Cirebon dan Jawa Barat, 2018

Hal ini karena selama kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, sektor perikanan sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat wilayah Cirebon bahkan juga mampu menyediakan untuk daerah lain.

Nilai LQ untuk sektor pertambangan dan industri pengolahan masih kurang dari 1, hal ini bermakna bahwa wilayah Cirebon dalam sektor industri pengolahan dan pertambangan belum dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan, realita untuk industri pengolahan masih belum berkembang secara signifikan dan masih dalam bentuk skala industri rumah tangga/usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sektor perikanan perlu didorong agar dapat berkembang dengan baik. Produksi perikanan yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penerapan sistem logistik yang baik (Mai et al. 2010). Dalam kerangka sistem logistik ikan nasional perhatian terhadap sistem logistik bidang perikanan harus ditingkatkan. Sistem logistik ikan nasional merupakan suatu sistem yang mendistribusikan manfaat serta risiko di antara pelaku yang terlibat di dalamnya. Keterkaitan dari berbagai proses harus dapat menciptakan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Setiap partisipan/pelaku yang terlibat dalam sistem logistik ikan harus saling berkoordinasi dalam tujuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Sistem logistik ikan merupakan representasi suatu struktur rantai pasok dan proses-proses yang akan dijalankan pada tiap tahap, yang meliputi: lokasi, produksi, desain produk, dan optimalisasi proses dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti politik, hukum, tata kelola pemerintahan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Penyusunan sistem logistik perlu mengacu pada faktor-faktor yang akan

menentukan peta jalannya industri dan perdagangan ikan pada masa mendatang atau yang disebut dengan *key drivers*, terdiri atas: (1) komoditas ikan penentu; (2) regulasi/kebijakan; (3) sumber daya manusia; (4) kelembagaan; (5) infrastruktur logistik; (6) teknologi informasi dan komunikasi; dan (7) penyedia jasa logistik. Penjelasan mengenai tujuh *key drivers* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komoditas ikan penentu. Dalam hal ini adalah komoditas perikanan penentu (kunci) dari seluruh kegiatan perikanan di wilayah Cirebon. Komoditas perikanan dalam konteks ini adalah komoditas perikanan yang mencakup kebutuhan untuk Domestik maupun Internasional, termasuk di dalamnya adalah bahan baku untuk industri olahan. Sesuai dengan prinsip kegiatan logistik, maka komoditas perikanan penentu tersebut ditentukan baik oleh nilai/harganya, maupun dari volume atau beratnya.
2. Regulasi dan/atau kebijakan terkait. Kebijakan sistem logistik ikan harus mencakup upaya sinkronisasi dan penyempurnaan peraturan perundangan (*laws* dan *regulations*) yang telah ada, atau menyiapkan peraturan perundangan yang baru apabila diperlukan. Kebijakan logistik perikanan meliputi peraturan perundangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan sektor perikanan secara khusus dan kepentingan negara pada umumnya. Selain pembuatan dan sinkronisasi dari peraturan-peraturan, juga pentingnya upaya penegakan hukum agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat efektif dijalankan oleh para pelaku.
3. Infrastruktur logistik. Untuk melakukan aktivitas logistik diperlukan infrastruktur logistik yang terdiri atas simpul logistik dan mata rantai logistik yang berfungsi menggerakkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik dapat berupa pelaku logistik, maupun konsumen, sedangkan link logistik meliputi jaringan

distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan.

4. Sumber Daya Manusia. Kebijakan logistik ikan harus menggariskan kebijakan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, termasuk pengembangan institusi lembaga atau program pendidikan dan pelatihan bidang logistik di lingkungan pemerintah dalam hal ini KKP dalam rangka peningkatan kompetensi, yang pada gilirannya akan memperbaiki kinerja tempat SDM tersebut berkarya.

5. Kelembagaan. Kebijakan logistik ikan harus mampu memberdayakan seluruh komponen atau pelaku secara optimal. Sinergisme dan integrasi dalam kegiatan logistik ikan merupakan hal penting untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan sektor perikanan. Koordinasi antar pelaku atau institusi yang terlibat baik secara vertikal maupun horisontal harus dapat diwujudkan untuk bersama-sama mendukung implementasi kebijakan sektor perikanan.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kebijakan logistik ikan harus menentukan arah pembangunan jaringan teknologi informasi, dan intensifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas dan kinerja sektor perikanan sehingga mampu memonitor pergerakan komoditas setiap saat pada semua simpul lintasan distribusi dan juga mempermudah transaksi antara berbagai pihak yang terkait dalam rantai suplai perikanan.

7. Penyedia Jasa Logistik. Kebijakan logistik ikan harus fokus untuk memberdayakan jasa-jasa yang terkait dengan sektor perikanan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para penyedia jasa logistik untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dalam arti yang luas, termasuk perusahaan penyedia jasa logistik lokal, agar lebih profesional dan memiliki daya saing, tidak saja dalam skala lokal tetapi juga global.

Komoditas unggulan perikanan di setiap pelabuhan perikanan wilayah Cirebon memerlukan sistem logistik yang baik karena pelabuhan merupakan pusat aktivitas perikanan tangkap yang menjadi tahap awal dalam mengelola perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Potensi sumberdaya perikanan di wilayah pantai utara merupakan modal bagi masyarakat khususnya di wilayah Cirebon yang perlu dikelola dengan baik agar dapat menggerakkan pembangunan perekonomian wilayah (Gumilang, 2019). Untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Cirebon yang lebih tinggi lagi di masa mendatang maka paling tepat dengan mendorong sektor industri pengolahan berbasis hasil laut. Pemerintah di masa mendatang harus meningkatkan peranan sektor industri pengolahan, karena sektor industri termasuk salah satu *leading sector*, yang artinya pertumbuhan sektor industri akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti sektor perikanan yakni dengan mengembangkan industri perikanan laut secara terpadu di wilayah Cirebon. Hal ini karena industri Kepelabuhanan Perikanan (IKP) merupakan kegiatan industri yang berhubungan dengan perikanan dan dilakukan di dalam pelabuhan perikanan. Kegiatan ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu industri penangkapan ikan, industri pengolahan ikan dan industri tambahan atau pendukung. Industri pengolahan ikan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting karena mampu memberikan nilai tambah pada ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan (Pane, 2010).

Pembangunan perikanan berbasis pelabuhan dimaksudkan untuk menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat nelayan, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Nelayan sebagai salah satu penggerak

kegiatan di pelabuhan perikanan harus turut serta dilibatkan dalam kegiatan pembangunan (Diniah et al, 2012). Sunoko dan Huang (2014) dan Persaulian et al. (2013) menyatakan bahwa untuk memperkuat bisnis perikanan, maka paradigma nelayan yang sebelumnya hanya menerima harga jual perlu menjadi penentu harga jual. Untuk itu, pengembangan perikanan Cirebon harus didasarkan pada: a) adanya ketersediaan sumber daya ikan secara berkesinambungan; b) hasil tangkapan yang didaratkan haruslah memiliki nilai ekonomi tinggi dan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah besar; c) keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatannya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; d) keterkaitan antar sektor di mana keberadaan pelabuhan memberikan *multiplier effect* sehingga dapat mengembangkan ekonomi wilayah. Pengembangan pelabuhan perikanan terutama dalam konteks wilayah hendaknya dipahami sebagai suatu proses pengembangan fungsi-fungsi yang ada dalam wilayah tersebut termasuk fungsi-fungsi ekonomi.

Dalam konteks kewilayahan, pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas ekonomi perikanan yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan, pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas ekonomi perikanan yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. (Solihin dan Rokhman 2009). Pelabuhan perikanan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan dan masyarakat nelayan. Hal ini karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang di dalamnya terdapat hubungan antar kelompok seperti nelayan, pedagang,

pengolah maupun unsur masyarakat terkait lainnya.

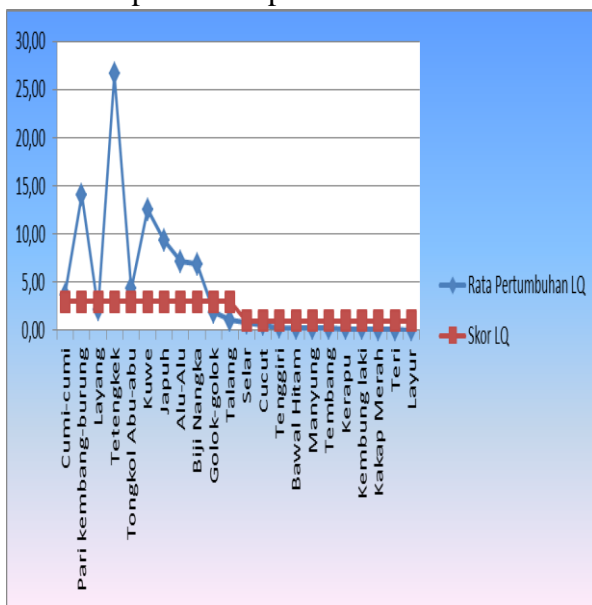
Analisis Komoditas Hasil Tangkapan Unggulan

Hasil perikanan tangkap merupakan komoditas kebutuhan pokok di Indonesia sebagai negara maritim. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap konsumsi laut maka telah ditetapkan ikan sebagai komoditas barang kebutuhan pokok melalui regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adanya penerapan jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan berbasis unggulan dengan pengembangan integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan dengan pemasaran baik lokal maupun ekspor menjadi penting dilakukan (Gumilang et al.2016).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan merupakan pelabuhan perikanan terbesar di wilayah Cirebon dan menjadi potret sektor perikanan di wilayah Cirebon. Informasi mengenai produksi ikan hasil tangkapan unggulan yang didaratkan di sekitar PPN Kejawan sangat diperlukan. Tempat pendaratan ikan yang menjadi alternatif produksi bagi kebutuhan industri di PPN Kejawan adalah tempat pendaratan yang berada di sekitar PPN Kejawan. Secara keseluruhan terdapat 25 jenis ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Kejawan selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2018. Dari jumlah tersebut terdapat 22 jenis ikan yang sama di PPN Kejawan dan tempat pendaratan ikan di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2014-2018 dengan nilai skor LQ 1 dan 3.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, terdapat 11 jenis ikan yang memiliki nilai pertumbuhan positif dengan skor 3 yaitu Cumi-cumi, Pari, Layang, Tetengek, Tongkol, Abu-abu, Kuwe, Japuh, Alu-Alu, Biji Nangka, Golok-golok, dan Talang. Skor LQ 3 mengindikasikan bahwa jenis ikan tersebut terkonsentrasi secara relatif pendaratannya di PPN Kejawanan dan dapat terus dikembangkan seoptimal mungkin untuk menjadi bahan baku industri pengolahan ikan di PPN Kejawanan khususnya industri pengolahan cumi-cumi karena volume produksi ikan yang relatif tinggi. Semakin besar nilai LQ yang dihasilkan menunjukkan semakin terkonsentrasinya perusahaan komoditas tersebut di PPN Kejawanan dan mengindikasikan komoditas tersebut memiliki keunggulan secara komparatif.

Komoditas hasil tangkapan lainnya bersifat nonbasis dengan skor LQ 1 yang mengindikasikan bahwa pendaratan jenis-jenis ikan hasil tangkapan tersebut tidak terkonsentrasi di PPN Kejawanan. Data rata-rata pertumbuhan LQ dan skor LQ per jenis ikan di PPN Kejawanan Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rata-rata pertumbuhan LQ dan skor LQ per jenis ikan di PPN Kejawanan Tahun 2014-2018

Tabel 1 Nilai Location Quotient (LQ) per jenis ikan di PPN Kejawanan Tahun 2014-2018

Jenis Ikan	Rata-rata Pertumbuhan LQ	Skor LQ
Cumi-cumi	3,81	3
Pari kembang-burung	14,62	3
Layang	2,24	3
Tetengek	27,80	3
Tongkol Abu-abu	4,48	3
Kuwe	12,76	3
Japuh	9,86	3
Alu-Alu	7,54	3
Biji Nangka	7,21	3
Golok-golok	1,97	3
Talang	1,10	3
Teri	0,09	1
Tenggiri	0,33	1
Tembang	0,21	1
Selar	0,78	1
Manyung	0,25	1
Layur	0,01	1
Kerapu	0,17	1
Kembung laki	0,14	1
Kakap Merah	0,10	1
Cucut	0,59	1
Bawal Hitam	0,26	1

Sumber: Data olahan penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2 salah satu komoditas unggulan dan dominannya ditangkap nelayan di PPN Kejawanan adalah Cumi-cumi. Komoditas hasil laut ini dihasilkan oleh nelayan dengan menggunakan alat tangkap Bouke Ami, Cast Net dan Pancing Cumi. Bouke Ami merupakan alat tangkap dominan yang digunakan nelayan untuk menangkap cumi-cumi. Distribusi cumi-cumi dimulai dari nelayan dan pemilik kapal yang melakukan kontrak kerja sama untuk menghasilkan ikan dengan keuntungan yang optimal. Permintaan cumi-cumi dari perusahaan eksportir sangat tinggi. Ekspor cumi-cumi dilakukan dalam bentuk produk utuh beku. Pola produksi dimulai dari proses penangkapan oleh nelayan,

dilanjutkan dengan proses pembekuan. Nelayan melakukan proses penangkapan ikan dengan trip bulanan. Eksportir melakukan proses produksi cumi-cumi dari bahan baku menjadi produk beku. Distribusi hasil tangkapan dimulai dari pemilik kapal membeli ikan dari nelayan, yang selanjutnya akan dijual ke perusahaan eksportir. Eksportir melakukan proses pembekuan dan packaging, untuk selanjutnya didistribusikan ke pasar ekspor.

Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan *center* perekonomian mulai saat ikan didaratkan sampai awal ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Tersedianya pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan mempunyai peranan dalam meningkatkan keterkaitan fungsional antar sub sistem dalam suatu sistem agribisnis perikanan; meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan khususnya desa pantai; menunjang tumbuhnya usaha perikanan skala besar dan kecil; dan menunjang terwujudnya sentra produksi perikanan di suatu wilayah (Lubis 2011). Komoditas hasil laut berupa perikanan meniscayakan adanya jaminan ketersediaan stok ikan di laut sehingga masyarakat nelayan dituntut untuk menjaga kelestarian stok sumberdaya perikanan agar tetap berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi, sumberdaya ikan merupakan kepemilikan umum. Komoditas ikan sebagai hasil tangkapan laut memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan bila telah ditangkap oleh nelayan. Artinya, selama ikan masih di dalam laut, maka masih menjadi hak milik bersama yang siapapun dapat mengeksploitasinya (Mufid, 2018).

Ketersediaan jenis-jenis ikan bernilai ekonomis unggulan atau disertai jumlah yang melimpah di suatu pelabuhan perikanan akan mengakibatkan pedagang dan pengolah ikan tertarik melakukan pembelian dan usaha pengolahan di pelabuhan tersebut (Pane, 2010). Selain

dari sisi jumlah, ketertarikan pedagang dan pengusaha pengolahan untuk melakukan pembelian di Pelabuhan Perikanan karena mutu ikan hasil tangkapan yang bagus. Pantastico (2012) menyatakan bahwa mutu ikan hasil tangkapan akan memiliki nilai organoleptik yang baik bila mendapat penanganan awal yang bagus. Penggunaan es dan operasi penangkapan yang memiliki freezer di dalam palkah kapal nelayan menjadikan ikan hasil tangkapan di PPN Kejawanen bermutu baik.

Pengelolaan perikanan laut perlu memegang prinsip bioekonomi disertai dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas mutu hasil tangkapan, keberlanjutan stok sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan perairan laut. Dengan demikian sektor perikanan berbasis komoditas hasil tangkapan unggulan di wilayah Cirebon dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sektor perikanan di wilayah Cirebon memiliki nilai $LQ > 1$ yakni 3,02. Artinya bahwa sektor perikanan memiliki keunggulan komparatif yang lebih dari rata-rata atau dengan kata lain merupakan sektor basis. Komoditas ikan unggulan yang memiliki nilai pertumbuhan LQ positif dengan skor 3 yaitu Cumi-cumi, Pari, Layang, Tetengkek, Tongkol, Abu-abu, Kuwe, Japuh, Alu-Alu, Biji Nangka, Golok-golok, dan Talang. Jenis-jenis ikan tersebut terkonsentrasi pendaratannya secara relatif di Pelabuhan Perikanan Kejawanen dan dapat terus dikembangkan secara optimal untuk menjadi bahan baku industri pengolahan perikanan sehingga diharapkan dapat menggerakkan pembangunan ekonomi wilayah berbasis perikanan unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- _____.2018. Produk Domestik Regional Bruto Kota-Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2017. Cirebon: Badan Pusat Statistik.
- Budiharsono S. 2001. Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Paramitra.
- Diniah, Sobari MP, Seftian D. 2012. *Pelayanan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) terhadap kebutuhan operasi penangkapan ikan*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2(1): 41-49.
- Gumilang, A. P., Solihin, I., & Wisudo, S. H. 2016. *Pola Distribusi Dan Teknologi Pengelolaan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan Di Wilayah Pantura Jawa*. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 7(1), 67-76.
- Gumilang, A. P. (2019). Analisis Daya Saing Sektor Perikanan Di Kabupaten Cirebon. Jurnal Barakuda 45, 1(1), 1-7.
- Hendriani, A. S., M. Udan dan A. Findi. 2013. *Ekonomi Politik Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon Dalam Peningkatan Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Cirebon*. Jurnal Al-Muzara'ah Volume 1 Nomor 1 2013.13 Halaman
- Irnawati, Ririn., D Simbolon, B Wiryawan, B Murdiyanto, dan T W Nurani. 2011. *Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Di Taman Nasional Karimunjawa*. Jurnal Saintek Perikanan. Vol.7. No. 1, 2011: 1 – 9.
- Lubis E. 2011. *Kajian peran strategis pelabuhan perikanan terhadap pengembangan perikanan laut*. Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan. 5(2):1-7.
- Mai N, BogasonS, Arason S, Árnason S, Matthiasson T. 2010. *Benefits of traceability in fsh supply chains case studies*. British Food Journal. 112:976-1002.
- Mufid. 2018. *Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh al-Bī'ah di Wilayah Pesisir Lamongan*. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 12 No. 1, 2018: 1-16.
- Pane AB. 2010. *Kajian Kekuatan Hasil Tangkapan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi*. Jurnal Mangrove dan Pesisir. X (1): 8-19.
- Pantastico ERB. 2012. *Fisiologi Pasca Panen*. Gajah Mada Press. 2010.
- [PPN Kejawanan] *Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan*. 2018. Laporan Tahunan PPN Kejawanan 2018. Kota Cirebon: Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
- Persaulian, B., H. Aimon, dan A. Anis. 2013. *Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi, 1(2):1–23
- Rizal, Achmad. 2013. *Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurnal Akuatika. Vol. IV no. 2.
- Srinivasan UT. 2010. *Food security implications of global marine catch losses due to overfishing*. Journal of Bioeconomics. 12(3):183-200.
- Sunoko, R., and H.W. Huang. 2014. *Indonesia tuna fisheries development and future strategy*. Marine Policy Journal, 43:174–183.
- Solihin I, Rokhman MS. 2010. *Prioritas pemilihan lokasi pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang*. J.Buletin PP. 18(3):133-206.